

PENGARUH PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK SYIAH IRAN DI INDONESIA

Gonda Yumitro

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
yumitro@gmail.com

Abstract

Based on its ideology and model of developed movement, Iranian Shia has been intensely extending its ideology to various countries, including to Indonesia. The export of this ideology aims to create full power for Shia in the international world. Through literature reviews methodology, it is found that the thought and movement of Iranian Shia have influenced Indonesia significantly, especially by the support of Iran. These influences can be seen by the increasing number of followers, the development of education and publication activities, the involvement of Iran Shia cadres in Indonesian politics, and the developing of unfair and unbalance cooperation between Indonesia and the Iranian government.

Keywords: Iran, Indonesia, Movement, Shia, Thought.

Pendahuluan

Kemunculan Syiah sangat erat kaitannya dengan isu politik. Pasca meninggalnya Rasulullah, mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Menurut Syiah, Ali bin Abi Tholib adalah khalifah resmi yang direbut kekuasaannya oleh pemimpin pendahulu. Karenanya, mereka menamakan diri sebagai Syiah yang bermakna pengikut

Ali (Said, 2017). Begitu juga dalam kepemimpinan umat Islam, Syiah meyakini bahwa hanya keturunan Rasulullah saja yang berhak menjadi pemimpin (Jacob & Itan, 2003). Dalam perjalanannya, Syiah berkembang menjadi pemahaman agama yang berbeda dengan Sunni.

Dalam politik, Syiah membangun konsep sendiri yang mengatur sistem agar senantiasa sesuai dengan kepentingan Syiah. Mereka memperkenalkan konsep *wilayat al faqih* yang mencoba menggabungkan konsep demokrasi dengan fondasi keagamaan sesuai dengan yang mereka pahami. Implementasinya di Iran dikenal dengan bentuk negara Republik Islam Iran pasca revolusi 1979. Bahkan setelah itu, ideologi Iran semakin gencar diekspor ke berbagai negara lain, termasuk Indonesia.

Telah terjadi beberapa kali konflik yang berkaitan dengan isu Syi'ah, misalnya dalam peristiwa Sampang. Bahkan data di lapangan menunjukkan potensi terjadinya konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sangat kuat. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan politik, agama dan peningkatan jumlah pengikut Syiah di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisa pengaruh pemikiran dan gerakan politik Syiah Iran di Indonesia. Namun sebelumnya, penulis akan terlebih dahulu menggambarkan pemikiran dan gerakan politik Syiah Iran secara umum.

Pemikiran dan Strategi Politik Syiah

Syiah merupakan salah satu kelompok yang muncul dalam sejarah Islam dengan justifikasi sebagai pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut kelompok ini, yang paling berhak untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam pasca wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kelompok ini menilai bahwa sudah terjadi persekongkolan antara Abu Bakar Asshidiq dan Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan untuk merebut kekuasaan. Ali bin Abi Thalib baru menjadi khalifah setelah Ustman bin Affan wafat. Namun,

ternyata kepemimpinan beliau pun masih dipersoalkan oleh Aisyah, istri Rasulullah dan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan menyebabkan terjadinya perang siffin (Amin, 2001)

Isu yang awalnya berasal dari persoalan politik ini pun berkembang bahkan memunculkan perbedaan dalam memahami Islam. Bagi Syiah, Al-Qur'an yang dipakai oleh umat Islam sekarang ini sudah dipalsukan oleh Utsman bin Affan karena mereka menggunakan mushaf Utsmani. Menurut mereka, Al-Qur'an yang asli dibawa oleh Imam kedua belas yang akan menjelma menjadi imam Mahdi. Demikian juga, dalam permasalahan syariat, Syiah memandang bahwa sholat lebih utama jika menghadap batu atau tanah karbala yang merupakan perlambang dari terbunuhnya Hussein bin Ali pada tahun 680 M di Karbala (Kelidar, 1983). Selain itu, ada banyak perbedaan syariat lainnya termasuk masalah nikah mut'ah.

Namun demikian, dalam konteks politik sebagai kelompok yang merasa selama ini didiskriminasi dan tertekan, Syiah punya misi besar untuk mensyiahkan dunia Islam. Mereka dengan Bahasa sederhana mendukung semangat terbentuknya khalifah Syiah. Tentu saja untuk upaya ini mereka perlu melakukan berbagai strategi untuk menarik simpati dunia Islam, termasuk upaya menguasai berbagai negara yang ada di sekitar Saudi Arabia, mengingat Makkah dan Madinah merupakan dua kota suci yang berperan layaknya sumber mata air bagi ajaran Islam.

Sejauh ini, jumlah Syiah di dunia masih minoritas, mereka mewakili 15% dari semua umat Islam. Meskipun demikian, di beberapa negara jumlah mereka sudah menjadi kelompok mayoritas misalnya di Iran, Irak, Libanon dan Bahrain (Fuller, 2007). Fenomena Iran dan Libanon bahkan sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam isu politik Internasional, disamping ajaran ini berkembang di berbagai negara lainnya seperti Azerbaijan, Saudi Arabia, Lebanon, Syria, Kuwait, Afghanistan, Pakistan, India, Qatar, United

Arab Emirates, Indonesia, dan Yaman (Maleki, 2006). Kekuatan Syiah secara umum bisa terlihat dalam gambar berikut (Street, NW, Washington, & Inquiries, 2009):



Salah satu isu penting yang mengangkat persoalan Syiah adalah ketika terjadi revolusi Iran pada tahun 1979, dan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Pada dua kejadian tersebut, Syiah merupakan aktor politik penting, terutama dalam menggambarkan permusuhan mereka kepada *Sunni* (Zulkifli, 2013). Dua peristiwa ini mempunyai peran besar dalam memperkuat rasa persatuan di antara sesama kelompok Syiah untuk meraih kepentingan mereka.

Menurut Syiah, solidaritas di antara mereka perlu dibangun karena selama ini senantiasa menjadi korban dan diperlakukan secara kejam oleh *Sunni* (Nakash, 2003). Mereka menggambarkan bahwa hal ini sudah terjadi sejak perebutan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib dan dalam sejarah kekhalifahan berikutnya, seperti pada masa Abbasiyah (Al Da'mi, 2013). Padahal dalam realitasnya, merekalah yang senantiasa berlaku kejam ketika sudah mempunyai kekuatan.

Hal ini terlihat dari bagaimana Syiah dengan gencar melakukan berbagai pemberontakan dan tindakan kekerasan kepada rakyat Turki pada masa Turki Ottoman. Karena kerasnya sikap Syiah terhadap *ahlussunnah* Turki, menyebabkan Nader Shah mengeluarkan beberapa aturan istimewa untuk Syiah, seperti: 1. Syiah dikenali sebagai mazhab kelima dalam Islam; 2. Syiah perlu diberikan akomodasi khusus di kota Mekkah; 3. Setiap tahun perlu ada Amir al Hajj yang berasal dari Iran; 4. Antara Ottoman dan Persian harus saling tukar menukar duta besar (Al Da'mi, 2013).

Berbagai upaya untuk meraih kepentingan Syiah terus mereka lakukan sampai sekarang. Para pendukung Syiah terus berusaha membangun opini publik untuk menggambarkan bahwa Syiah bersih dari dosa masa lalu. Mereka menampilkan diri sebagai pahlawan bagi umat Islam di masa ketika negara-negara Islam sudah lemah menghadapi barat dewasa ini. Iran diperkenalkan sebagai negara yang tegas menghadapi barat. Hal ini rupanya menarik perhatian umat Islam dan menyebabkan kesulitan dalam memahami peta politik yang sesungguhnya.

Belum lagi dalam Pemikiran politik, Syiah terkenal sangat rasional dalam menggunakan konsep Marxisme berkaitan dengan teori dependensi. Bagi mereka semua bentuk dominasi barat yang berlangsung di dunia Islam selama ini harus segera diakhiri dengan menampilkan diri sebagai sosok yang mampu menengahi sikap ekstrim dan moderat dalam beragama. Karenanya Iran sebagai negara Syiah menampilkan diri dengan konsep *wilayat al faqih*. Melalui konsep politik ini, mereka optimis bahwa kepentingan Syiah akan bisa senantiasa diperjuangkan, meskipun aktor politik berganti¹. Ali Syariati, bapak revolusi Iran juga menawarkan penggabungan metode ideologi dan saintifik dalam menyelesaikan berbagai persoalan dunia Islam, selain karena tantangan eksternal. Karenanya ia terkenal dengan ucapannya, "*What is important to us now are Luther's and Calvin's works, since they transformed the Catholic ethics to a moving and creative force*" (Sukidi, 2005).

Ketika masih minoritas, Syiah akan sekuat mungkin berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana pun mereka berada. *Oleh karena itu*, dapat dipahami jika ada kebijakan pemerintah yang tidak mendukung keberadaan mereka maka Syiah akan protes sebagaimana yang dilakukan dalam upaya membatalkan fatwa MUI Jatim tentang kesesatan Syiah pada tanggal 21 Januari 2012. fatwa MUI tersebut juga didukung oleh Gubernur Jatim dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim (Ida & Dyson, 2015).

Adapun jika sudah kuat, mereka tidak segan melakukan tindak kekerasan. Hal ini bisa terlihat dari perkembangan politik di Iran dan Suriah dimana kelompok Sunni begitu tertekan. Di Iran, masjid-masjid Sunni dihancurkan dan para ulama dibunuh. Demikian juga di Suriah, akses terhadap ekonomi dan politik secara lebih luas diberikan kepada kelompok Syiah karena rezim politik dikuasai oleh Syiah Alawi. Pada masa revolusi sekarang ini pun, para ulama, anak-anak, wanita dan orang tua Sunni menjadi sasaran serangan kelompok Syiah.

Syiah sudah mulai menunjukkan identitas asli mereka setelah lepas dari kekuasaan Saddam Hussein di Irak. Konflik sektarian pun terus berlangsung, bahkan dengan jumlah korban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masa kekuasaan Saddam Hussein (Dale, 2007). Bahkan ketika masih studi di India, penulis menemukan kelompok Syiah Irak yang ketika mendengar atau menyebut nama Saddam Hussein maka mereka mengucapkan *la'natullahu 'alaihi*. Dengan kekuasaan Syiah sekarang, kelompok Sunni Irak mengalami diskriminasi yang menunjukkan semakin kuatnya ancaman Syiah.

Iran Sebagai Kekuatan Politik Syiah

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Iran punya posisi sangat strategis dalam perkembangan Syiah dewasa ini. Iran bahkan diangkap

sebagai motor penggerak bagi gerakan *Syiah Isna Ashr*, dimana sistem politik Syiah diimplementasikan melalui konsep *wilayat al faqih*. Oleh karena itu, posisi Ayatullah sangat strategis dan kuat sebagai penjamin politik Syiah di Iran termasuk dalam mendirikan lembaga-lembaga penting negara yang diatur dalam konstitusi Iran sebagaimana yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 1998 (Schirazi, 1997a).

Dengan pengaruh yang besar tersebut, bukan hanya institusi yang dijamin, tetapi juga sistem yang bisa memungkinkan para kader Syiah untuk menjadi pemimpin berpengaruh di negeri ini. Pada tanggal 14 Juni 2013 misalnya, Iran melaksanakan pemilihan presiden dan mampu mendorong Hassan Rouhani, seorang kader inti Syiah, terpilih sebagai presiden Iran menggantikan Ahmaddenejad yang sudah memimpin Iran selama dua periode. Posisinya cukup kuat karena memenangkan 18.613.329 atau 50,71% suara pemilih (News, 2013).

Atas kemenangan ini, banyak kalangan menilai bahwa Rouhani sebagai tokoh moderat akan membawa perubahan masa depan Iran yang lebih baik. Apalagi Khatami selaku Ayatollah Iran segera menyampaikan ucapan selamat kepada Rouhani. Tidak ketinggalan, rakyat Iran yang mayoritas Syiah pun menyambut gembira kemenangan ini. Jutaan orang berhamburan ke jalan meluapkan kegembiraan mereka. Sebagian membawa poster Rouhani dan lainnya menangiis haru. Mereka berkeyakinan bahwa Rouhani mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Iran selama ini, terutama berkaitan dengan sanksi Internasional akibat pengembangan reaktor nuklir. Pada dekade terakhir, Iran memang menghadapi berbagai masalah seperti pengangguran, kemiskinan, devaluasi mata uang, dan peningkatan inflasi.

Menyikapi berita tersebut, tulisan ini ingin menjelaskan bahwa terpilihnya Rouhani sebagai presiden Iran hanya akan mereformasi politik

domestik Iran. Adapun sikap kelompok Syiah dalam berhadapan dengan kalangan Sunni pada masa Rouhani tidak akan berubah, bahkan bisa lebih keras lagi. Dalam pandangan penulis, terpilihnya Rouhani bisa dimaknai sebagai bukti menguatnya konsolidasi Syiah Iran. Pendapat ini didasari oleh dua hal berkaitan dengan sistem politik Iran yang kental dengan nuansa Syiah dan sosok Rouhani yang merupakan kader inti Syiah.

Pertama, ketika berbicara tentang politik Iran maka tidak bisa dipisahkan dari kepentingan kelompok Syiah. Bahkan dalam konstitusi Desember 1979 dan amandemennya tahun 1989, Syiah imamah dinyatakan sebagai agama resmi di Iran (Ghadimi & Abbasalipour, 2011). Konsekuensinya adalah bahwa sistem politik, ekonomi dan sosial di Iran harus berdasarkan nilai-nilai teologi Syiah. Oleh karena itu, untuk menjaga ideologi Syiah dalam kehidupan masyarakat Iran maka dibentuk sistem yang secara sistematis memberikan kekuasaan kepada Ayatollah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam politik dan agama. Ia mampu mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahkan Ayatollah merupakan pihak yang berwenang melantik presiden terpilih dalam pemilu. Ia juga bisa memberhentikan presiden jika melanggar konsistutusi Iran. Selain itu, Ayatollah mempunyai wewenang mengangkat beberapa pejabat strategis seperti komandan militer, direktur jaringan radio dan televisi nasional, para pimpinan agama, imam di masjid, dan anggota dewan keamanan nasional yang berkaitan dengan urusan pertahanan dan politik luar negeri Iran. Ia juga berwenang mendeklarasikan perang dan damai (Akbarzadeh, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa Ayatollah mempunyai posisi yang lebih kuat daripada presiden Iran.

Adapun presiden, ia bertanggung jawab mengimplementasikan konstitusi dan tugas-tugas eksekutif lainnya. Ia memilih para menteri dan mengkoordinasikan keputusan pemerintahan dan mengambil kebijakan

yang sejalan dengan undang-undang. Meskipun demikian, khusus menteri intelijen dan menteri pertahanan maka pilihan presiden harus mendapat persetujuan Ayatollah. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama Syiah mempunyai posisi yang begitu kuat dalam eksistensinya pada politik Iran (Schirazi, 1997).

Dalam kaitannya dengan yudikatif, Ayatollah juga berhak memilih pimpinan hakim. Para hakim dengan pimpinan yang ditunjuk oleh Ayatollah inilah yang menjalankan hukum yang berlaku di Iran. Jika ada hukum yang dibuat oleh parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan Syiah maka Ayatollah mempunyai hak veto untuk membatalkan hukum tersebut. Terlihat bahwa posisi parlemen Iran juga lemah di hadapan Ayatollah. Pencalonan, pembuatan undang-undang, proses ratifikasi perjanjian internasional dan perencanaan anggaran belanja negara oleh parlemen harus berdasarkan persetujuan Ayatollah.

Posisi Ayatollah yang begitu kuat dalam politik Iran ini menunjukkan bahwa siapapun presidennya, ia akan kesulitan untuk menentang sistem Syiah yang sudah dijadikan sebagai dasar dalam konstitusi bernegara. Sistem ini merupakan implementasi ideologi Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan mereka hanya boleh berada pada garis keturunan Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu*, yang mereka kenal dengan dua belas imam. Selama imam ke-12 masih menghilang maka kepemimpinan akan diserahkan kepada Ayatollah. Sejauh ini, posisi tersebut baru ditempati oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dan tahun 1979 sampai dengan kematiannya tahun 1989 dan Ayatollah Ali Khomeini dari tahun 1989 hingga sekarang (Ganji, 2008).

Kedua, selain karena sistem yang kental dengan kepentingan Syiah, terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran menjadi momentum kelompok Syiah untuk semakin menegaskan kepentingan mereka dalam politik Internasional dan dalam hubungannya dengan kelompok *Sunni*. Hal

ini dikarenakan Rouhani merupakan kader inti Syiah sejak masih muda dan dikenal sebagai mujtahid Syiah. Karenanya, ia sempat menempati berbagai posisi strategis dalam politik Iran. Bahkan sejak menyelesaikan pendidikannya dari Qum dan Glasgow University, Rouhani mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan politik Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1965, Rouhani berkeliling Iran untuk menyampaikan penentangannya terhadap rezim Shah.

Selain itu, kedekatan Rouhani dengan tokoh sentral Syiah Iran tadi dapat dilihat dari posisi Rouhani yang merupakan orang pertama yang menyebut Khomeini sebagai imam pada tahun 1977. Bahkan sejak itu, ia memperkenalkan Khomeini dan ajarannya kepada para mahasiswa Iran di luar negeri secara aktif. Demikian juga dalam berbagai kebijakan politik dan luar negeri Iran, Rouhani mempunyai peran yang sangat besar. Ia begitu konsisten memperjuangkan kepentingan Syiah. Karena itu pula, dalam pencalonannya sebagai presiden, Rouhani didukung oleh tokoh-tokoh sentral Syiah Iran seperti Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani serta kelompok reformis lainnya.

Berdasarkan dua kondisi di atas, terlihat bahwa Rouhani tetap mendukung upaya menyebarkan misi untuk mensyiahkan semua umat Islam di berbagai belahan dunia. Iran juga akan tetap terlibat aktif membantu kelompok-kelompok Syiah di berbagai negara, seperti dalam kasus Suriah, Sampang, dll. Dalam lingkup domestik, Iran akan tetap menerapkan politik diskriminatif, kaum Sunni Iran akan kehilangan kebebasan mereka dalam melaksanakan ajaran agama. Lebih dari itu, Iran senantiasa akan membangun opini publik untuk melemahkan posisi negara-negara *Sunni*, seperti Saudi Arabia, melalui berbagai media massa yang mereka miliki dan jaringannya.

Sejarah dan Perkembangan Syiah Iran di Indonesia

Menurut penelitian, Syiah berkembang di Indonesia melalui beberapa jalur, seperti dari jalur keturunan Arab, Alumni Qum, kelompok kampus,

dan konversi Sunni menjadi Syiah (Halimatusa'diyah, 2013). Garis keturunan Hadrami merupakan salah satu jalur penyebaran Syiah di Indonesia dan berlangsung sudah cukup lama. Karenanya, pengaruh mereka pun sudah dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat. Di Bengkulu, Pariaman dan Sigli misalnya, pengaruh mereka luar biasa besar di tengah masyarakat dimana setiap tahun mereka senantiasa mengadakan ritual Tabot untuk memperingati kematian Hussein (Kartomi, 2012).

Apalagi pasca revolusi Iran 1979, pengaruh kelompok Syiah semakin menguat ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ide revolusi berkaitan dengan pemerintahan otoriter Indonesia pada waktu itu cukup mudah diterima di kalangan kampus. Pemikiran Ali Syariati cukup dominan karena banyak ilmuwan yang kagum dengan cara berfikir beliau dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Termasuk pemikiran Mullah Sadra Mutahhari yang egaliter dalam mewujudkan keadilan sosial dan moralitas dalam kehidupan budaya, ekonomi dan politik masyarakat.

Karena itu pula, semakin banyak masyarakat Indonesia yang belajar ke Iran, dan akhirnya menjadi kader Syiah. Di antara mereka adalah Umar Shahab dan saudaranya Hussein Shahab yang kini menjadi tokoh Syiah terkenal di Jakarta. Begitu juga dengan Abdurrahman Bima yang memimpin *Madina Ilmu College for Islamic Studies*, di Depok. Di Pekalongan, dikenal nama Ahmad Baragbah yang memimpin pesantren Al-Hadi. Bahkan Jalaluddin Rakhmat dan keluarganya pernah tinggal selama satu tahun di Qum untuk secara khusus belajar kepada Ayatollah (Z. Zulkifli, 2009). Perkembangan Syiah yang pesat ini pula yang membuat MUI mengeluarkan fatwa Syiah sebagai aliran sesat pada tahun 1984.

Menurut MUI, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah, di antaranya adalah berkaitan dengan penolakan Syiah terhadap hadits yang tidak diriwayatkan dari jalur ahlul bait. Selain itu, Syiah juga

mempunyai pandangan bahwa para imam mereka yang dua belas adalah imam yang ma'sum, padahal dalam pandangan Sunni hanya Rasulullah yang maksum. Demikian juga, berkenaan dengan pemahaman Syiah yang menganggap kepemimpinan di bawah imam merupakan bagian dari rukun agama sehingga mereka tidak menerima sistem khilafah, terutama tiga sahabat yang mendahului Ali bin Abi Thalib (Hasyim, 2012).

Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia

Berdasarkan uraian berkaitan dengan pemikiran dan gerakan politik Syiah Iran di atas, Indonesia telah mendapatkan pengaruh signifikan dari keberadaan aliran ini. Hal ini misalnya terlihat dari beberapa realita berikut:

Peningkatan Jumlah Pengikut

Berbagai berita yang terjadi di dunia Islam lainnya perlu menjadi pelajaran bagi perkembangan Syiah yang sudah semakin besar di negeri ini. Data menunjukkan bahwa paling tidak penganut Syiah di Indonesia sudah mulai mencapai satu juta orang yang tersebar di berbagai wilayah terutama di Jakarta, Bandung and Makassar (Formichi, 2011). Dalam penelitian yang lain juga disebutkan peningkatan jumlah Syiah ini muncul dan berkembang pesat pasca terjadinya revolusi Iran 1979 dan reformasi di Indonesia. Dengan inspirasi dari revolusi Iran, banyak diantara intelektual muslim Indonesia yang belajar di Iran sehingga terpengaruh dengan ajaran Syiah. Adapun pasca reformasi 1998 di Indonesia, semakin terbuka peluang bagi Syiah untuk mengorganisasi diri terutama dengan berdirinya organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Hasyim, 2012).

Pengembangan Kegiatan Pendidikan Dan Publikasi

Setelah mulai mengorganisasi diri, Syiah mulai bergerak aktif membangun beberapa lembaga mengembangkan yayasan YAPI yang

sebelumnya sudah berdiri di Bangil pada tahun 1976. Beberapa lembaga baru yang berdiri tersebut antara lain Al-Hujjah (1987) di Jember, Muthahharin (1988) di Bandung, Al-Hadi (1989) di Pekalongan, Al-Jawad (1991) di Bandung, Al-Muntazar (1992) di Jakarta, Al-Kazim (1994) di Cirebon, IPABI (1993) di Bogor, Rausyan Fikr (1995) di Yogyakarta, Fatimah (1997) di Jakarta, dan Pusat Budaya Islam Al Huda (2000) di Jakarta. Belum lagi beberapa lembaga Syiah lainnya yang tersebar di berbagai kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya (Zulkifli, 2013).

Mereka juga menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia dengan mendirikan beberapa pesantren, YAPI di Bangil, Al-Hadi di Pekalongan, Dar al-Taqrib di Bangsri Jepara, Al-Mukarramah di Bandung, and Nurul Tsaqalain di Leihitu, Maluku Tengah (Zulkifli Zulkifli, 2014). Tidak hanya itu, penyebaran ide melalui berbagai media tulisan mereka lakukan dengan mendirikan beberapa penerbitan seperti Pustaka Hidayah, Mizan, Lentera, and YAPI (Yayasan Penyiaran Islam) Jakarta, Pustaka Zahra and Cahaya (Endut, 2012) Menurut data BIN, sekarang paling tidak terdapat 29 penerbit dan 65 yayasan Syiah yang tersebar di Wonosobo, Banjarmasin, Samarinda, dan berbagai daerah Indonesia lainnya. Semua penerbit dan yayasan tersebut berpotensi menyebabkan konflik di tengah masyarakat.

Keterlibatan Kader Syiah Iran Dalam Politik Praktis

Apalagi ketika reformasi datang, posisi Syiah semakin menguat dan mulai berani menampilkan diri di depan khalayak. Keran kebebasan dibuka luas di Indonesia, karenanya IJABI pun didirikan. Organisasi ini banyak bergerak pada level lokal dan budaya masyarakat, melengkapi logika rasional yang sudah berkembang di tengah sebagian ilmuwan Indonesia. Mereka mulai berani melakukan ritual-ritual Syiah secara terbuka seperti peringatan Ashura pada tahun 2010 di Bandung. Bagi kelompok Syiah, reformasi

merupakan angin segar bagi perkembangan mereka yang lebih besar, bahkan mengarah pada kekuasaan politik sebagaimana mulai dijangki oleh Jalaludin Rakhmat yang bergabung ke partai politik.

Kondisi menjadi lebih serius lagi, ketika masyarakat mulai terpengaruh dengan konspirasi Syiah yang menampilkan Iran sebagai aktor yang sangat berani menentang barat. Banyak yang tidak menyadari bahwa Syiah merupakan persoalan serius. Dalam kasus yang sekarang masih hangat di Sampang, kita bisa melihat bagaimana reaksi pemerintah dan dunia Internasional, yang menilai bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Namun mereka tidak melihat masalah dari akarnya. Amnesty Internasional misalnya menyatakan bahwa sikap kelompok Sunni Indonesia merupakan bukti berkembangnya diskriminasi menentang kelompok minoritas di Indonesia (Mashuri et al., 2014).

Pengembangan Kerjasama yang Tidak Berimbang

Beberapa kali penulis sempat berdiskusi dengan teman yang menulis di media sosial tentang Iran. Biasanya, tulisan mereka menceritakan kekaguman terhadap sikap politik luar negeri Iran yang keras terhadap Amerika. Belum lagi sosok mantan presiden Iran, Ahmadenejad yang digambarkan sebagai sosok sempurna. Sampai-sampai ada seorang dokter dan aktifis muslim yang berkomentar, "Kapan Indonesia bisa mempunyai pemimpin hebat seperti ini?".

Gambaran kekaguman ini bukan tanpa sebab. Jika diperhatikan selama ini, memang pemberitaan tentang Iran sangat positif di beberapa media utama Indonesia. Apalagi berbagai kerjasama pun dikembangkan oleh Iran dengan cukup "memikat" terhadap pemerintah Indonesia, pada berbagai bidang, seperti minyak, teknologi, militer, kedokteran dan sosial budaya. Padahal, jika dikaji lebih mendalam maka terlihat bahwa kepentingan penyebaran Syiah cukup kentara dalam berbagai kerjasama tersebut. Di pihak lain, jika bicara tentang hubungan diplomatik antar negara maka hal prinsip yang

seharusnya berlaku adalah perlunya kerjasama *reciprocal* yang saling menguntungkan dan tidak mengganggu keutuhan negara lain. Persoalan yang terjadi dalam kerjasama dengan Iran adalah ancaman Syiah terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia belum dipahami secara umum oleh berbagai kalangan masyarakat.

Pada akhirnya, hal tersebut membuat Iran mengesankan berbagai nilai lebih yang bisa ditawarkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan teknologi telah membuat kerjasama tersebut berimbang. Jika diperhatikan, efek dari kerjasama itu adalah perubahan terhadap budaya dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat, juga memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan sekedar perubahan secara materi. Masalahnya adalah, tidak jarang karena persoalan materi, orang rela untuk merubah budaya dan nilai yang dimilikinya. Kondisi inilah yang terjadi dalam hubungan Indonesia dengan Iran. Karena beberapa kepentingan materi, terutama dalam hal kebutuhan minyak, dimana dari nilai perdagangan Indonesia dengan Iran, 88% nya merupakan impor Indonesia terhadap minyak Iran, maka pemerintah seakan abai dengan efek sosial budaya yang terjadi (Yumitro, Kusumaningrum, Ramadhoan, & Prasetyo, 2014).

Apalagi dengan baik, Iran juga berharap agar bisa menyimpan stok minyaknya di Indonesia, dan siap untuk terus membeli *Crude Palm Oil* (CPO) dari Indonesia. Dari perspektif ekonomi dimana Indonesia masih belum bisa mengeksplorasi sumber daya minyak dan memenuhi pasokan dalam negeri secara mandiri, hal ini dinilai menguntungkan Indonesia. Demikian juga dalam berbagai bidang lainnya, seperti sains dan teknologi, serta militer, Iran memberikan tawaran yang menarik. Hal ini misalnya terlihat dalam acara *Jakarta International Defense Dialogue* (JIDD) di Jakarta, pada 20 – 21 Maret 2013 tahun lalu, dimana Deputy Menteri Pertahanan (Menhan) Iran bidang

Internasional Brigjen Kalantari menawarkan kerjasama bidang teknologi militer. Menurutnya, Iran telah mempunyai berbagai teknologi pertahanan yang modern yang sangat mungkin untuk dibagi dengan Indonesia.

Bukan hanya berbagai bidang kerjasama yang ditawarkan oleh Iran, melainkan cara yang ditempuh pun sangat cantik. Di antaranya adalah dengan penggunaan media yang massif dan upaya menggaet aktor-aktor intelektual, terutama dari berbagai kampus besar di Indonesia. Artinya, dari upaya untuk membangun opini publik, Iran bermain cantik agar peluang penolakan dari berbagai kalangan masyarakat bisa diantisipasi. Hal ini misalnya bisa terlihat dari upaya Kementerian Luar Negeri Iran yang secara maksimal berusaha menjajaki kerjasama dengan kantor berita nasional dan berbagai media baik cetak maupun elektronik di Indonesia. Harapannya adalah agar berbagai informasi dari Iran akan bisa menyebar luas di Indonesia. Padahal, jika kita memahami struktur politik Iran maka akan terlihat bahwa kepala Radio dan Televisi Iran ditunjuk oleh Ayatollah. Artinya, isi berita pun harus sesuai dengan kepentingan ajaran Syiah.

Pengaruh Iran yang mempunyai tradisi filsafat dan keilmuan yang cukup kental pun menjadi daya tarik bagi para pemuda dan ilmuwan Indonesia. Pemerintah Iran dengan cerdas mendekati para intelektual yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Dengan cara ini, misi penyebaran Syiah pun terlihat lebih ilmiah dan potensi ditolak pun semakin rendah. Padahal, jika dilihat secara teliti, terutama berkaitan dengan kepentingan sosial budaya Iran di Indonesia maka kepentingan Iran yang sesungguhnya semakin terlihat, setidaknya dari aspek sosial budaya. Tidak seimbangnyanya kerjasama ini bisa dipahami dengan beberapa realita berikut:

Pertama, tidak seimbangnyanya jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Iran, dan mahasiswa Iran yang belajar di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Iran, bahkan sudah

mencapai angka 7000 orang. Artinya, jumlah pelajar Indonesia tersebut lebih besar dari mereka yang belajar di Mesir. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa kebanyakan dari para pelajar tersebut, berangkat ke Iran bukan dengan beasiswa yang disepakati dalam kerjasama formal. Beasiswa tersebut mereka dapatkan dari berbagai yayasan yang beraliran Syiah. Adapun secara formal, hanya 200 mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di kampus Iran.

Pada sisi lain, sebagaimana layaknya kerjasama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga secara rutin, setiap tahunnya menawarkan beasiswa Darmasiswa kepada pelajar Iran untuk belajar di Indonesia. Namun dari tahun 2005-2012, hanya 15 orang pelajar dari Iran yang mengikuti program beasiswa ini. Bahkan tidak ada satu pun yang pernah berpartisipasi dalam Beasiswa Seni Budaya Indonesia yang diadakan oleh Kemlu sejak tahun 2003. Dari data di atas, terlihat bahwa perbandingan yang tidak berimbang ini memungkinkan pengaruh Iran lebih besar masuk ke Indonesia. Mengingat sebagian besar mendapatkan beasiswa dari yayasan Syiah maka peluang percepatan penyebaran Syiah di Indonesia juga semakin besar. Sementara pengenalan budaya Indonesia ke Iran tidak bisa optimal dilakukan mengingat hanya sedikit warga Iran yang belajar budaya Indonesia.

Kedua, Iran gesit membuka berbagai sarana yang bisa memperkenalkan budaya dan nilai masyarakatnya kepada masyarakat Indonesia, tetapi di sisi lain, kesempatan Indonesia untuk melakukan hal yang sama terkesan dibatasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pusat-pusat kebudayaan dan informasi Iran yang didirikan di Indonesia. Paling sedikitnya, Iran telah memiliki 6 (enam) *Islamic Cultural Center (ICC)*, di samping *12 Iran Corner* di berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Riau, Universitas Muhamadiyah Jakarta, dll.

Seorang dosen yang pandai berbahasa Parsi pernah berkomentar bahwa ia bingung dengan alasan berbagai kampus tadi bersedia untuk mendirikan Iranian Corner di Indonesia. Padahal jika dibaca, berbagai referensi yang berbahasa Inggris memang terkesan umum memberikan informasi tentang sosial, budaya, politik, dan ekonomi Iran. Namun, jika dibaca referensi yang berbahasa Parsi maka hampir semua buku yang tersedia berbicara tentang ajaran Syiah. Terlihat bagaimana Iran begitu cerdas membungkus kerjasama yang mereka bangun dengan Indonesia selama ini.

Pada sisi lain, jika mau berfikir jernih, sebenarnya akan terlihat kegagalan lain dari kerjasama antara Indonesia dengan Iran ini. Jika di atas dijelaskan bahwa dengan mudah Iran bisa memperkenalkan budaya (Syiah) nya ke tengah masyarakat Indonesia, kondisi berbeda yang dialami oleh Indonesia ketika ingin memperkenalkan budaya masyarakat yang sebagian besar Sunni ini. Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai satu pun *Indonesian Corner* di kampus-kampus besar atau terkenal di Iran.

Bahkan terkesan pemerintah Iran kurang mendukung upaya membangun pusat kajian Indonesia di Iran. Secara ketat pemerintah Iran mengawasi pergerakan misi kebudayaan Indonesia di Iran. Bahkan beberapa pentas kebudayaan Indonesia yang akan diadakan di Iran dilarang. Yang lebih tidak adil adalah ketika pelarangan tersebut seringkali disampaikan mendekati waktu pementasan, atau bahkan beberapa jam sebelum pentas dimulai. Dari keadaan ini, terlihat bahwa Iran sangat gesit ingin menyebarkan ajaran Syiah ke Indonesia, tetapi tidak ingin ada bagian dari ajaran atau budaya Sunni masuk dan berkembang di negara mereka.

Ketiga, Iran secara aktif berusaha mencari pengakuan agar ajaran Syiah diterima sebagai bagian dari Islam, sementara secara domestik mereka tidak menerima keberadaan kelompok Sunni. Hal ini misalnya terlihat dari beberapa agenda yang intens dikawal oleh Iran, seperti kegiatan pada bulan

Januari 2013, dimana mereka mengundang berbagai ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan UIN untuk terlibat dalam kegiatan *Intra Faith Dialogue and Cooperation Sunni-Shiite*.

Pada bulan April 2013, Iran juga mengadakan pertemuan *World Assembly of Islamic Awakening* di Taheran. Menurut Iran, upaya ini merupakan langkah untuk mendorong persatuan umat Islam di dunia. Menurut pemerintah Iran, hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dunia Islam selama ini. Apalagi dalam hubungannya dengan Indonesia, mereka menyampaikan bahwa Indonesia dan Iran telah mempunyai hubungan dekat sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Hal ini bisa dilihat dari situs-situs kerajaan Samudra Pasai dimana di batu nisan ratu Na'ina Husam al-Din, terdapat kutipan syair dalam bahasa Parsi dari penyair terkemuka Persia Syeikh Muslim al-Din Sa'adi (1193-1292 M).

Penutup

Berdasarkan berbagai data yang disampaikan di atas, nampak bahwa secara politik bahkan dalam pemahaman agama, Syiah mempunyai perbedaan pandangan dengan kelompok Sunni yang mayoritas. Hanya saja, secara intensif mereka mengembangkan pengaruhnya ke berbagai negara Islam lainnya melalui berbagai cara sehingga mendapatkan kesan positif di tengah umat Islam, termasuk di Indonesia. Akibatnya, pelan-pelan Syiah sebagai pemikiran dan gerakan mulai diterima dibanyak kalangan masyarakat.

Di Indonesia misalnya, pengaruh pemikiran dan gerakan politik Syiah Iran terlihat dari beberapa hal seperti peningkatan jumlah pengikut, Pengembangan kegiatan pendidikan dan publikasi, keterlibatan dalam politik praktis, dan pengembangan kerjasama yang tidak berimbang dan cenderung merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Al Da'mi, M. (2013). *The Other Islam: Shi'ism: From Idol-Breaking to Apocalyptic Mahdism*. AuthorHouse.
- Jacob, E. S., & Itan, Y. (2003). *The New Encyclopaedia Britannica*. Chicago. Encyclopaedia Britannica Inc.
- Kartomi, M. (2012). *Musical journeys in Sumatra*. University of Illinois Press.
- Nakash, Y. (2003). *The Shi'is of Iraq*. Princeton University Press. Zulkifli.
- (2013). *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. ANU E Press. Maleki, A.
- (2006). *Extremism in Islamic Shiite's Faith. Roots and Routes of Democracy and Extremism*, Eds, Timo Hellenbury and Kelly Robins, Helsinki: University of Helsinki Publication, Alexander Institute.

Jurnal

- Akbarzadeh, S. (2005). *Where Is The Islamic Republic Of Iran Heading?* Australian Journal of International Affairs, 59(1), 25–38.
- Endut, M. S. R. (2012). *Ali Shari'ati and Morteza Motahhari's Ideological Influences on Intellectual Discourse and Activism in Indonesia*. E Work of the 2009/2010 API Fellows, 204.
- Fuller, G. E. (2007). *The Hizballah-Iran Connection: Model For Sunni Resistance*. The Washington Quarterly, 30(1), 139–150.
- Ganji, A. (2008). *The Latter-Day Sultan-Power and Politics in Iran*. Foreign Aff., 87, 45.
- Ghadimi, T., & Abbasalipour, S. (2011). *A Survey On The Origin Of Safavids' Religion From Iranian And Non-Iranian Researchers' Points Of View*. The Social Sciences, 6(3), 177–180.
- Halimatusa'diyah, I. (2013). *Being Shi'ite Women In Indonesia's Sunni-Populated Community: Roles And Relations Among Themselves And With Others*. South East Asia Research, 21(1), 131–150.

- Hasyim, M. (2012). *Shia: Its History and Development in Indonesia*. *Analisa*, 19(2), 147–158.
- Ida, R., & Dyson, L. (2015). *Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intra-Religius Pada Komunitas Di Sampang-Madura. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(1), 33–49.
- Kelidar, A. (1983). *The Shii Imami Community And Politics In The Arab East*. *Middle Eastern Studies*, 19(1), 3–16.
- Mashuri, A., Supriyono, Y., Khotimah, S. K., Sakdiah, H., Sukmawati, F., & Zaduqisti, E. (2014). *Examining Predictors Of Tolerance And Helping For Islamic Religious Minorities In Indonesia*. *International Journal Of Research Studies In Psychology*, 3(2), 15–28.
- Said, M. H. (2017). *Doktrin Syi'ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya*. *Al-Fikra*, 8(2), 334–359.
- Sukidi. (2005). *The Traveling Idea Of Islamic Protestantism: A Study Of Iranian Luthers*. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 16(4), 401–412.
- Yumitro, G., Kusumaningrum, D. N., Ramadhoan, R. I., & Prasetyo, D. M. (2014). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan Timur Tengah: Sebuah Analisa Opini Publik: Laporan Akhir*. Centre of Midle East Studies, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zulkifli, Z. (2009). *The Education of Indonesian Shi 'i Leaders*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 47(2), 231–267.
- Zulkifli, Z. (2014). *Education, Identity, And Recognition: The Shi 'I Islamic Education In Indonesia*. *Studia Islamika*, 21(1), 77–108

Internet

- Amin, H. A. (2001). *The Origins Of The Sunni/Shia Split In Islam*. *Islam For Today*.

Retrieved from:

[http://cdn.preterhuman.net/texts/religion.occult.new_age/Islam/
The%20Origins%20of%20the%20Sunni-Shia%20split%20in
%20Islam.pdf](http://cdn.preterhuman.net/texts/religion.occult.new_age/Islam/The%20Origins%20of%20the%20Sunni-Shia%20split%20in%20Islam.pdf)

Dale, S. (n.d.). *Tradition vs Charisma: The Sunni-Shi'i Divide in the Muslim World | Origins: Current Events in Historical Perspective*. Retrieved August 20, 2017, from <http://origins.osu.edu/article/tradition-vs-charisma-sunni-shii-divide-muslim-world>

Formichi, C. (n.d.). *Lovers of the Ahl al-Bayt*. Retrieved August 20, 2017, from <http://www.insideindonesia.org/lovers-of-the-ahl-al-bayt>

News, B. (2013, June 15). *Hassan Rouhani Wins Iran Presidential Election*. *BBC News*. Retrieved from <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22916174>

Schirazi, A. (1997a). *The Constitution Of Iran: Politics And The State*. Retrieved from <http://www.academia.edu/download/48386675/j.1949-3606.1999.tb00789.x20160828-28181-9ztqn1.pdf>

Schirazi, A. (1997b). *The Constitution Of Iran: Politics And The State In The Islamic Republic*. Retrieved from: <http://www.academia.edu/download/48386675/j.1949.3606.1999.tb00789.x20160828-28181-9ztqn1.pdf>

Street, 1615 L., NW, Washington, S. 800, & Inquiries, D. 20036 U. 419 4300 | M. 419 4349 | F. 419 4372 | M. (2009, October 7). *Mapping The Global Muslim Population*. Retrieved August 20, 2017, from <http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/>

